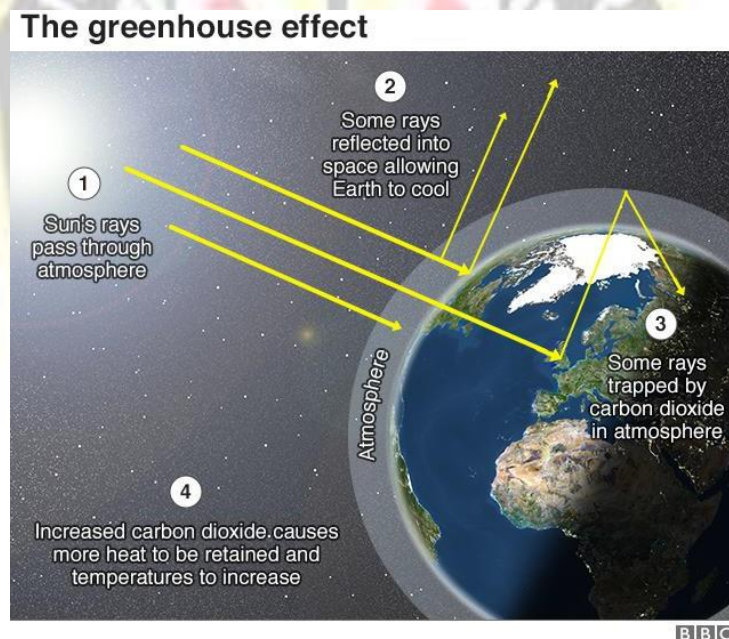


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan masalah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (IPCC, 2018), yang menghasilkan berbagai gas yang disebut sebagai gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan gas berfluoronasi (hidrofluorokarbon, perfluorocarbon, sulfur heksafluorida, dan nitrogen trifluorida) (US EPA, 2015). Gas-gas ini memiliki sifat menghalangi sebagian panas matahari untuk memancar kembali keluar dari bumi, sehingga menghasilkan fenomena yang disebut sebagai efek rumah kaca. Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai proses terjadinya efek rumah kaca, dilansir dari BBC (2021) :



Gambar 1. Ilustrasi Proses Terjadinya Efek Rumah Kaca

Sumber: BBC (2021)

Berdasarkan ilustrasi di atas, energi matahari yang masuk ke bumi diserap oleh gas rumah kaca, dan dipantulkan kembali ke segala arah sehingga bumi menjadi panas. Dilansir dari BBC (2021), sebenarnya tanpa adanya efek

ini, bumi menjadi 30°C lebih dingin dan tidak layak untuk ditinggali. Namun, aktivitas manusia yang semakin meningkat menyebabkan keberadaan gas rumah kaca juga semakin meningkat dan tidak terkendali sehingga suhu bumi meningkat tajam. Dilaporkan bahwa sejak 1880 suhu gabungan (darat dan laut) mengalami peningkatan 0,08 °C per decade. Akan tetapi, sejak 1981 kenaikan suhu bumi rata-rata dilaporkan sebesar 0,18°C atau dua kali dari peningkatan suhu tahun 1880 (NOAA Climate, 2021). Selain itu, suhu rata-rata gabungan bumi pada tahun 2020 adalah 1,76° F (0,98° Celcius) lebih hangat daripada suhu rata-rata abad kedua puluh yaitu sebesar 57,0 ° F (13,9°C) dan 2,14°F (1,19°C), lebih hangat daripada suhu rata-rata periode pra-industri (1880-1900).

Kenaikan suhu ini memunculkan dampak yang beragam bagi penduduk bumi. Berbagai penelitian telah melaporkan ancaman perubahan iklim terhadap berbagai aspek kehidupan, di antaranya ancaman terhadap ketahanan pangan (Jerneck & Olsson, 2013; Mycoo, 2018), tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut (Asugeni dkk., 2019; Mycoo, 2018; SaleemKhan dkk., 2020), menurunnya kualitas, kuantitas, dan variasi produk pertanian (Ashley dkk., 2016; Choko dkk., 2019), kekeringan (Ashley dkk., 2016; Choko dkk., 2019; Lasage dkk., 2015), kesehatan (Jerneck & Olsson, 2013), dan bencana alam (Ashley dkk., 2016; Choko dkk., 2019).

Di Indonesia perubahan iklim banyak berdampak pada kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Penelitian yang dilakukan oleh Mycoo (2018) menemukan bahwa negara kepulauan merupakan daerah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Temuan ini didukung oleh penelitian Prabowo & Salahudin (2017) yang menemukan bahwa 83 dari 92 pulau terluar Indonesia terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut, sehingga rawan mempengaruhi batas-batas terluar wilayah Indonesia.

Perubahan iklim juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan. Ulfa (2018) bahkan menyatakan bahwa sekitar 70% nelayan Indonesia mengalami kemiskinan akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena

perubahan cuaca yang tidak menentu ditambah kerusakan lingkungan membuat nelayan kesulitan menentukan waktu melaut sehingga jumlah tangkapan nelayan berkurang (Isdianto & Luthfi, 2020; Pattinama, 2020; Ulfa, 2018).

Selain ancaman terhadap wilayah pesisir, perubahan iklim juga berdampak pada sektor agraris. Dilaporkan bahwa perubahan iklim berdampak pada penurunan luas panen dan produksi padi di Malang Raya dan Sumatra Selatan dengan penurunan 1,37% per tahun (Ruminta dkk., 2018). Hal ini menyebabkan kenaikan harga beras pada daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim dan beresiko menurunkan pendapatan petani (Rasmikayati & Djuwendah, 2015; Rum & Sihaloho, 2017). Perubahan iklim juga berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas panen produk tanaman buah dan sayur di Indonesia yang dipicu oleh degradasi tanah dan meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (Sarvina, 2019; Utami, 2019).

Berbagai bencana alam juga muncul akibat perubahan iklim. Tabel berikut merupakan fenomena ekstrem yang terjadi akibat perubahan iklim yang dihimpun dari berbagai artikel Bahasa Indonesia, artikel Bahasa Inggris, dan laporan proyek (Perdinan dkk., 2017):

Tabel 1. 1 Tabel Kejadian Fenomena Ekstem di Indonesia

No	Fenomena Ekstrem	Lokasi Kejadian
1	Banjir	Malang, Jabodetabek, Pekalongan, Indramayu, Boyolali, Tegal, Kabupaten Bojonegoro, Kota Jakarta, Muara Angke, Tambak Lorok, Indramayu, Lampung, Makassar, Bali, Jakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bdanung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Malang Raya, Malang Raya, Malang Raya, Sumatera Selatan, Tarakan, Yogyakarta, Desa Mojo, Desa Klompok, dan Desa Lengensari.
2	Kekeringan	Malang, Maluku, Mojokerto, Semarang, Jabodetabek, Lampung, Boyolali, dan Kalimantan Barat, Provinsi

No	Fenomena Ekstrem	Lokasi Kejadian
		Kalimantan Tengah, Kabupaten Pacitan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Barat, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kota Semarang, Kota Makassar, dan Indramayu, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Bali, Kabupaten Kudus, Salatiga, Semarang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bdanung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Malang Raya, Sumatera Selatan, dan Tarakan.
3	Iklm ekstrem	seluruh wilayah Indonesia
4	Kenaikan muka air laut	Pekalongan, Bali, Jakarta Utara, Indramayu, Tuban, Bali, Cirebon, Ciamis, Kubu Raya, Kota Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Sumatera Selatan, dan Tarakan, dan sebagian wilayah pesisir Indonesia
5	Angin kencang/puting beliung	Subang, Bali, Bangka, Ciamis, Kubu Raya, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Blitar, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Kabupaten Batang, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Bengkulu
6	Penyakit	seluruh wilayah Indonesia
7	Tanah longsor	Makassar, Jakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Blitar, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Kabupaten Batang, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kabupaten Kudus, Salatiga, dan Sumatera Selatan

Sumber: (Perdinan dkk., 2017)

Berdasarkan Tabel 1. 1 di atas, terlihat bahwa fenomena ekstrem seperti iklim ekstrem dan penyakit akibat perubahan iklim terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan terlibat dalam forum iklim dunia untuk turut serta mengatasi permasalahan iklim. Berbagai kesepakatan dunia mengenai perubahan iklim seperti Protokol Kyoto pada tahun 1998 dan Kesepakatan Paris berhasil diratifikasi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga merilis berbagai produk kebijakan dan dokumen terkait perubahan iklim berjenjang dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/ SK Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sampai tingkatan Peraturan Desa (DitjenPPI, 2020). Pemerintah juga menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam penanganan perubahan iklim melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang pengelolaannya diteruskan pada masing-masing wilayah melalui Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Pada tahun 2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS menerbitkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada tahun 2014 (BAPPENAS, 2014). Dokumen ini berisikan aksi adaptasi untuk menjaga ketahanan masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti petani, nelayan, dan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis sebuah program yang mendukung aksi adaptasi dan mitigasi pada level komunitas formal (desa) bertajuk ProKlim (Program Kampung Iklim). Acuan pelaksanaan ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim. Di Jawa Tengah, pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Program Kampung Iklim Di Jawa Tengah.

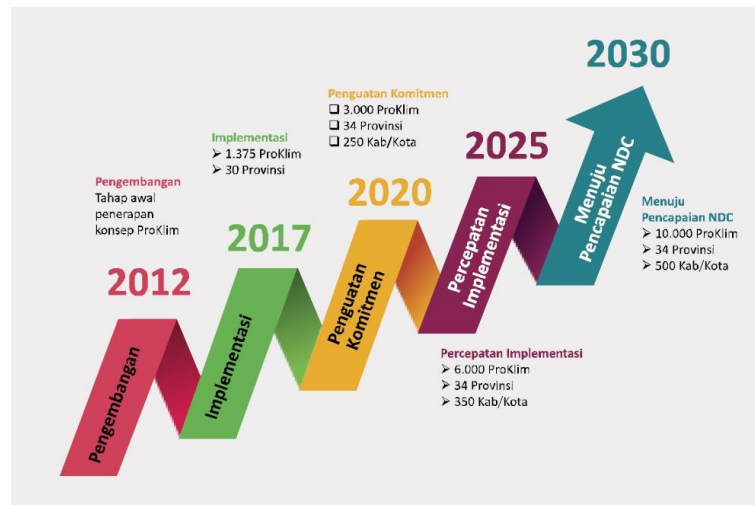
Kampung Iklim merupakan bagian dari Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah.

Komponen utama pelaksanaan ProKlim adalah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan jenis kegiatan yang sudah ditentukan oleh KLHK. Aksi adaptasi memiliki kegiatan berupa; a) pengendalian bencana iklim b) peningkatan ketahanan pangan, c) penanganan atau antisipasi bencana iklim di wilayah pesisir, dan d) pengendalian penyakit terkait iklim. Sedangkan aksi

mitigasi memiliki kegiatan berupa; a) pengelolaan sampah dan limbah, b) penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, c) budidaya pertanian rendah emisi GRK, d) peningkatan tutupan vegetasi, dan e) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaannya, Kampung Iklim yang terdaftar mengikuti proses penilaian diberikan apresiasi dalam bentuk kategori ProKlim sesuai dengan hasil perhitungan nilai komponen aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kategori ProKlim terdiri dari ProKlim Pratama, ProKlim Madya, Nominasi ProKlim Utama, dan Nominasi ProKlim Lestari. Kampung Iklim dalam kategori Nominasi ProKlim Utama dan ProKlim Lestari berhak mendapatkan apresiasi dari Menteri LHK.

ProKlim merupakan kebijakan yang memiliki pendekatan *bottom up* dan ditetapkan pemerintah dalam rangka pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2030 dimana Indonesia menargetkan adanya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% (dengan upaya sendiri) hingga 41% (apabila mendapat dukungan internasional) sebagai bentuk komitmen Indonesia terkait Perjanjian Paris yang sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement. Sebagai indikator keberhasilan ProKlim dalam mendukung tercapainya target NDC Indonesia tahun 2030, pemerintah menargetkan terdatanya kegiatan ProKlim pada lebih dari 10.000 lokasi Kampung Iklim yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Secara rinci, diharapkan pada tahun 2030 setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal 20 lokasi ProKlim dengan berbagai kategori yaitu pratama, madya, utama dan lestari. Berikut merupakan *road map* pencapaian target dan sasaran ProKlim dari tahun 2019 hingga tahun 2030 (Albar dkk., 2017):



Gambar 2. Road Map Pencapaian Target dan Sasaran ProKlim

Sumber: Albar dkk. (2017)

Geliat antusiasme masyarakat terhadap gerakan penyelamatan iklim terlihat pada adanya tren perkembangan jumlah lokasi kampung iklim yang meningkat dari tahun ke tahun. Per 2019, sudah ada 2.146 lokasi kampung iklim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan tren pengusulan lokasi kampung iklim dari tahun 2012 hingga tahun 2019:



Gambar 3. Tren Pengusulan Lokasi ProKlim Tahun 2012- 2019

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2012, pengusulan lokasi ProKlim terus meningkat namun menurun drastis pada tahun 2019. Penurunan ini mungkin terjadi akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim sehingga kegiatan ProKlim terhenti. Nasruddin dkk. (2020) dan Simon dkk. (2020) menyatakan bahwa perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah, dan komunitas yang lebih besar dalam pengelolaan perubahan iklim dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pernyataan senada diungkapkan oleh (Nora & Irwan, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penciptaan Kampung Iklim digerakkan melalui organisasi berbasis masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila pemilihan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Faedlulloh, Irawan, dkk., 2019). Menurut IPCC (2018), adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap perubahan dan dampak perubahan iklim untuk mengurangi bahaya atau kerugian dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Penundaan aksi adaptasi akan membuat negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan adaptasi sehingga aksi adaptasi perlu untuk segera dilakukan (Clissold & McNamara, 2020).

Salah satu strategi adaptasi yang terbukti sukses mengembangkan ketangguhan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi adalah adaptasi berbasis komunitas atau *community-based adaptation* (CBA). CBA merupakan strategi adaptasi dengan pendekatan *bottom-up* dimana komunitas mengkombinasikan kearifan lokal, kemampuan komunitas, potensi keterpaparan dampak perubahan iklim dan partisipasi interaktif dari anggota komunitas dalam menyusun rencana adaptasi terhadap perubahan iklim (Adhikari & Taylor, 2012; Ahmed dkk., 2014; McNamara dkk., 2020). CBA mensyaratkan komunitas untuk menyusun rencana adaptasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi dampak perubahan iklim sehingga aksi adaptasi masing-masing komunitas berbeda-beda. Di Indonesia, CBA diimplementasikan dalam bentuk Kampung Iklim dengan wilayah

administratif terendah setingkat Rukun Warga (RW) atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa (KLHK, 2016).

Ahmed dkk. (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa keterlibatan lembaga lokal dengan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk anggota masyarakat, LSM, lembaga pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dapat membantu pengembangan kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan strategi CBA (dalam hal ini ProKlim). Prinsip pelaksanaan ProKlim adalah berbasis masyarakat dan sumber daya alam (*community and local resource based*) serta berkelanjutan (Albar dkk., 2017). Pentingnya keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* dalam mendukung kesuksesan perencanaan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) membuat *community-based adaptation* (CBA).

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang menganalisis penerapan ProKlim di Indonesia, diantaranya penerapan ProKlim di Surakarta (Dewi dkk., 2019; Gunawati & Rejekiningsih, 2020), Jakarta (Faedlulloh, Irawan, dkk., 2019; Medha, 2020), Bantul (Mardika dkk., 2018), Bengkalis (Mashur & Meiwanda, 2019), Garut (Muttaqin dkk., 2019), Sleman (Priyanto dkk., 2020), dan Gowa (Wahab, 2015). Akan tetapi, penerapan ProKlim yang diteliti hanya berasal dari satu lokasi ProKlim dengan tipologi yang sama sehingga diperlukan penelitian mengenai penerapan ProKlim di dua lokasi dan tipologi wilayah yang berbeda. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki lokasi ProKlim di wilayah pesisir dan pegunungan dengan kategori penilaian yang sama. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal.

1.1 Perumusan Masalah

Lokasi ProKlim yang mendapat nominasi dan penghargaan ProKlim Utama secara nasional pada tahun 2019 adalah lokasi ProKlim Desa Kartikajaya dan Desa Gondang. Lokasi ProKlim Desa Kartikajaya berada di pesisir utara Kabupaten Kendal dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sedangkan Lokasi ProKlim Desa Gondang berada di ketinggian >600 mdpl dan

berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, ProKlim dilaksanakan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah. Dengan latar belakang geografis yang berbeda, maka pemilihan kegiatan ProKlim di lokasi ProKlim Desa Gondang dan Desa Kartikajaya juga berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pegunungan di Kabupaten Kendal Jawa Tengah?
2. Bagaimana penerapan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pesisir di Kabupaten Kendal Jawa Tengah?
3. Bagaimana perbandingan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pegunungan dan pesisir di Kabupaten Kendal Jawa Tengah?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pegunungan di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
2. Menganalisis penerapan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pesisir di Kabupaten Kendal Jawa Tengah
3. Membandingkan penerapan *community-based adaptation* di lokasi ProKlim kawasan pegunungan dan pesisir di Kabupaten Kendal Jawa Tengah

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti maupun aktivis lingkungan dalam mengembangkan *community-based adaptation* pada lokasi ProKlim kawasan pegunungan dan pesisir.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan *community-based adaptation*, baik untuk lokasi ProKlim atau lokasi rintisan ProKlim.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan di masyarakat dalam merumuskan *community-based adaptation*, baik untuk lokasi ProKlim atau lokasi rintisan ProKlim.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini menganalisis penerapan *community-based adaptation* (CBA) pada lokasi ProKlim Desa Gondang sebagai representasi lokasi ProKlim pegunungan dan lokasi ProKlim Desa Kartikajaya sebagai representasi lokasi ProKlim pesisir. Penelitian mengenai *community development* pada ProKlim telah banyak dilakukan oleh peneliti lain pada lokasi ProKlim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun sama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, istilah *community-based adaptation* (CBA) lebih umum digunakan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Bahkan, belum ditemukan penelitian yang menggunakan istilah *community development* dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada jurnal manapun yang berbahasa Inggris. Publikasi berbahasa Inggris yang menggunakan istilah *community development* ditemukan pada prosiding seminar internasional dengan studi kasus ProKlim di Indonesia. Penelitian ini hadir dengan membawa istilah yang lebih relevan dengan ProKlim, yaitu *community-based adaptation* (CBA) atau adaptasi berbasis komunitas. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum mengakomodir

perbedaan perencanaan dan pelaksanaan CBA pada lokasi ProKlim dengan karakteristik geografis yang berbeda. Untuk memetakan posisi penelitian, hasil penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
1	Strategi Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan (Wahab, 2015)	Mempelajari dan mengembangkan konsep penerapan dan pelaksanaan ProKlim di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Provinsi Sulawesi Selatan.	Strategi dalam pengembangan ProKlim di Desa Mangempang adalah sosialisasi, kegiatan adaptasi, kegiatan mitigasi, dan partisipasi masyarakat.
2.	<i>Kampung versus Climate Change: The Dynamics of Community Empowerment through the Climate Village Program</i> (ProKlim) (Faedlulloh, Prasetyanti, dkk., 2019)	Menjelaskan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui ProKlim di Desa Jati Jakarta Timur dan Desa Kebon Kosong Jakarta Pusat.	Kedua lokasi menunjukkan hasil yang baik dalam pemberdayaan dan pelaksanaan ProKlim. Akan tetapi, kontribusi desa dalam permasalahan iklim global terbatas sehingga perlu adanya peran dan intervensi negara melalui kebijakan makro.
3.	<i>Community Participation in the Village Climate Program to</i>	Menganalisis partisipasi masyarakat di lokasi ProKlim untuk	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ProKlim menunjukkan hasil yang baik dan perlu ditingkatkan.

No	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
	<i>Anticipate Future Climate Change in Wetlands</i> (Nasruddin dkk., 2020)	mengantisipasi dampak perubahan iklim pada lahan basah.	
4.	<i>Climate village program (ProKlim) in Simurugul Sub-Village, Margawati Village, Garut Kota Sub-Regency, Garut Regency, West Java Province, Indonesia</i> (Muttaqin dkk., 2019)	Menganalisis aktivitas untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di Dusun Simurunggul, manfaat kegiatan, dan status cadangan karbon terkini.	Manfaat ProKlim bagi masyarakat adalah peningkatan ketahanan menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat, serta pengurangan emisi gas rumah kaca dengan stok karbon (1.430,50 ton) di Dusun Simurugul
5.	<i>Building Ecological Citizens Through the Implementation of Climate Village Programs as Climate Change Mitigation Effort</i> (Gunawati & Rejekiningsih, 2020)	Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan ProKlim di Surakarta	Hambatan pelaksanaan ProKlim di Surakarta adalah kurangnya pengetahuan mengenai aksi mitigasi perubahan iklim, kurang optimalnya sosialisasi dari DLHK, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.
6.	<i>Potential Sustainability of “Kampung Iklim” Program in Surakarta Municipal</i> (Dewi dkk., 2019)	Mengidentifikasi indikator variabel yang mempengaruhi keberlanjutan ProKlim di Kota Surakarta.	Terdapat 12 indikator dalam variabel sosial, yaitu <i>communication, innovation, institutional, capacity of local government officials, participation, awareness, networking, local actor, government, culture of society and</i>

No	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
			<p><i>norm, local leader, and human resources</i>. Terdapat 3 indikator dalam variabel ekologi, yaitu <i>resources and skills, mitigation activities, and adaptation activities</i>. Dalam variabel ekonomi, indikator meliputi kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.</p>
7.	<p><i>Adaptation And Mitigation Of Climate Change Based On Community Empowerment</i> (Mashur & Meiwanda, 2019)</p>	<p>Menganalisis implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis telah menyadari dampak perubahan iklim dan kerusakan iklim pada ekosistem mangrove. Untuk itulah mereka melakukan strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan melibatkan dunia usaha dan pemerintah dalam kegiatannya.</p>
8.	<p><i>Climate Village Program for Climate Change Adaptation and Mitigation for Green Villages</i> (Herdiansyah, 2021)</p>	<p>Memberikan pelatihan dan bantuan terhadap komunitas di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan adaptasi dan mitigasi</p>	<p>Memberikan pelatihan dan bantuan terhadap komunitas di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Kampung Hijau</p>

No	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
		terhadap perubahan iklim melalui Kampung Hijau.	
9.	<i>Community Empowerment In Serut Village On Climate Change Adaptation And Mitigation</i> (Mardika dkk., 2018)	Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor determinan dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Desa Serut.	Pemberdayaan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dilakukan secara alami oleh masyarakat Desa Serut yang dilandasi oleh perasaan senasib (korban gempa Jogja), budaya dan norma, pemimpin lokal dan pemerintah.
10.	<i>Climate governance and the role of local institutions in facilitating adaptive capacity: The case of the 'Climate Village Program', DKI Jakarta, Indonesia</i> (Medha, 2020)	Menganalisis peran kualitas kapasitas adaptif yang dimiliki institusi dan mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang kompleks dan tidak pasti melalui praktek CBA.	Pelaksana ProKlim belum memiliki kapasitas adaptif karena ketegangan dalam pelaksanaan CBA <i>bottom-up</i> dan <i>top-down</i> sehingga menghambat kemampuan masyarakat untuk merespon dan berimprovisasi sesuai dengan kondisi lingkungan.
11.	Persepsi Dan Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perubahan Iklim Di Desa Sarawet Kabupaten Minahasa Utara (Yuliantoro & Wahyuni, 2019)	Mengetahui persepsi masyarakat mengenai perubahan iklim serta aksi adaptasi yang telah dilakukan.	Sebanyak 96,67% masyarakat telah merasakan dampak perubahan iklim yang dipersepsikan sebagai cuaca ekstrem dan musim yang tidak menentu. Upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat berupa penggantian jenis tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air, membangun sumur

No	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
			bor sentral untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dan memanfaatkan sumber mata air.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan di atas, terlihat bahwa telah terdapat banyak penelitian yang sejenis dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang luput dari jangkauan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu belum menganalisis *community-based adaptation* aksi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada lokasi ProKlim kawasan pegunungan dan pesisir mulai dari perencanaan, pemilihan aksi adaptasi dan mitigasi, aspek keberlanjutan, dan hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengakomodir *gap* dari temuan penelitian-penelitian terdahulu.

SEKOLAH PASCASARJANA